

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya.²

Pada dasarnya kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.³ Menurut teori Marjinal kemiskinan terjadi disebabkan adanya kebudayaan miskin yang tersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu.⁴ Kemiskinan dapat dikatakan sebagai salah satu penyakit suatu negara, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan menjadi permasalahan yang sering

² Teddy Christianto Leasiwal, "Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku", *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, 2013, hal 169-303

³Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22 No. 2 (2014), hal. 2

⁴ Rudy Susanto dan Indah Pengesti, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta", *Journal of Applied Business and Economic*, Vol. 5 No. 4 (2019), hal. 343

muncul di negara-negara berkembang maupun negara miskin. Permasalahan kemiskinan di negara berkembang menjadi cukup rumit meskipun negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional.

Pemerintah Indonesia menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan terutama pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pembangunan daerah tentunya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Sasaran pembangunan nasional telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.⁵

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang

⁵ Dermoredjo, "Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan", *Jurnal Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, (2003), hal 291-324

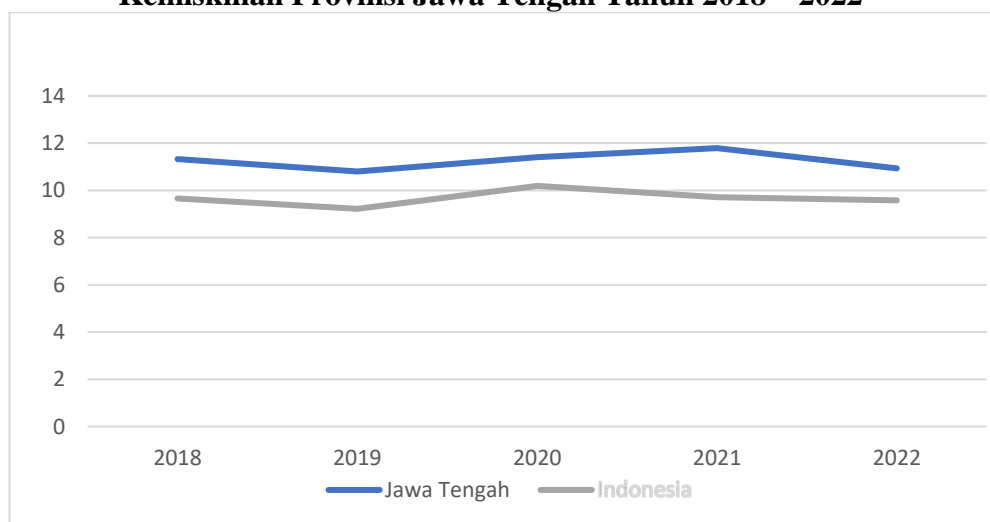
sebenarnya. Banyak orang yang dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.⁶

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah harus memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan perbaikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Lembaga non-pemerintah dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya tambahan untuk program-program ini. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya mengatasi kemiskinan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pelatihan keterampilan, mempromosikan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan membentuk komunitas yang saling mendukung. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, perubahan positif dapat dicapai dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini akan membutuhkan komitmen jangka panjang dan upaya berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini.

⁶ Ali Khomsan, et. al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 6

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 32,8 km², terdiri dari 35 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk mencapai 37,03 juta jiwa.⁷ Hal ini menjadi gambaran pembangunan manusia yang bervariasi dan tentunya tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam <https://jateng.bps.go.id/> diakses pada Oktober 2023

Pada Gambar 1.1 diatas menjelaskan tingkat kemiskinan Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 11,32 %. Sempat turun diangka 10,8 %, kemudian naik kembali pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 11,79 %. Lalu turun kembali pada tahun 2022 diangka 10.93 %. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih dikatakan tinggi mengingat rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,57 %.⁸

Angka kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Selain itu, dampak kemiskinan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat memiliki sumber daya ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan kata lain, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta bersaing dalam dunia kerja. Jika angka kemiskinan terus meningkat, maka dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. Diperlukan upaya konkret untuk mengatasi akar permasalahan dan menciptakan kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan.⁹

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan penanggulangan kemiskinan, bahkan merupakan salah satu program prioritas. Menurut BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah upaya

⁸Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia* ,dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada November 2023

⁹ Laga Priseptian, Wiwin Priana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan", *Forum Ekonomi*, Vol. 24 (1) 2022, hal. 45-53

penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui lima pilar yang meliputi perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, dan kemitraan regional.¹⁰

Menurut Larasati Prayoga, et. all., bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain taraf hidup masyarakat yang buruk, upah minimum yang tidak memadai, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.¹¹ Kemiskinan yang terjadi dapat dilihat dari taraf hidup masyarakat yang ditunjukkan pada indeks pembangunan manusia. Rendahnya produktivitas kerja akan mengakibatkan rendahnya IPM dan untuk menciptakan manusia yang berkualitas diperlukan peningkatan kualitas SDM yang mana dapat diukur dengan IPM.¹² Indikator tersebut antara lain indeks pendidikan, indeks harapan hidup, dan indeks standar hidup layak, dimana indikator tersebut dapat memberikan interpretasi dalam pembangunan manusia dan dapat melihat atau mengukur tingkat kesejahteraan.¹³

Faktor selanjutnya yaitu upah minimum, pemberian upah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghindari dari permasalahan

¹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, “*Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)*” dalam <https://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen-publik/dokumen-perencanaan/strategi-penanggulangan-kemiskinan-daerah-spkd/> diakses pada Oktober 2023

¹¹ Larasati Prayoga, et. all. Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 3 No. 2 (2021), hal.135–143

¹² Andhyka, et. all, Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33 No. 2 (2018)

¹³ Fadila, R., & Marwan, M. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, Vol. 3 No. 1 (2020)

yang berhubungan dengan perekonomian seperti kemiskinan. Masyarakat dengan upah minimum yang tinggi dalam suatu daerah memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang tinggi juga, dan sebaliknya jika upah minimumnya rendah pada suatu daerah maka masyarakat memiliki standar hidup dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. Adanya pemberian upah upah minimum dapat membantu suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan dan meminimalisir kemiskinan.¹⁴

Faktor penyebab kemiskinan yang lain yakni pengangguran. Pengangguran pada prinsipnya adalah hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan sesuatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kondisi menganggur menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan, akibatnya kesejahteraan yang telah dicapai akan semakin merosot. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.¹⁵

¹⁴ Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra, "Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945", *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2 (2011), hal. 270

¹⁵ Astuti, M. & Lestari, I. Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta. *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18 No. 2 (2018). hal. 149-164

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinata, et. all, pada tahun 2020 menghasilkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.¹⁶ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yulia Adella Sari pada tahun 2021 menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.¹⁷ Serta penelitian yang dilakukan oleh Ema Dian, et. all pada tahun 2021 menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.¹⁸

Peneliti memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan di wilayah tersebut, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan dan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Dengan fokus pada Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih khusus

¹⁶ Dinata, et. all. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2003-2018. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 16*, Vol. 2 (2020)

¹⁷ Adella Sari. Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, Vol. 10 No. 2 (2021). hal 121-130

¹⁸ Ema Dian, et.all. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12 No. 2 (2021). hal. 129-136

dan solutif terhadap permasalahan kemiskinan di tingkat provinsi, serta menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu, tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat menghambat perekonomian, perlunya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat faktor – faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan seperti indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka, serta pentingnya bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian di suatu daerah. Maka dari itu dari itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, cakupan yang dapat diduga sebagai masalah, Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia, menghadapi masalah serius dalam hal kemiskinan. Meskipun provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang baik, kemiskinan

masih merata di berbagai lapisan masyarakatnya, termasuk di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah telah berupaya dalam menekan angka kemiskinan dengan cara memperbaiki sumber daya manusia dan melakukan pembangunan guna meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Tercapainya tingkat kemiskinan yang rendah akan selaras dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat diantara salah satu variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah variabel upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh diantara indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk menguji pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan paraktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini supaya dijadikan sebuah referensi untuk menambah teori ilmu pengetahuan dan mampu memberikan wawasan bagi pembaca. Selain itu dalam penelitian ini dapat dijadikan tambagan informasi tambahan yang berkaitan dengan kajian makro ekonomi yang membahas mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian yang dilakukan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kajian makro ekonomi yang membahas mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi indikator tambahan dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan upaya pengentasan kemiskinan terutama yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa yang akan meneliti kajian dengan masalah yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat pengangguranterbuka.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan dan pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rerata sederhana, terdapat tiga Indeks yang menggambarkan kemampuan manusia guna memperluas pilihan yaitu, indeks standar hidup layak, indeks harapan hidup, indeks pendidikan. IPM juga kerap kali dijadikan sebagai indikator guna melihat upaya serta kinerja program pembangunan secara menyeluruh pada wilayah tertentu. Indeks pembangunan manusia dianggap sebagai output dari program pembangunan yang telah dikerjakan beberapa tahun terbelakang.¹⁹

b. Upah Minimum

Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum,

¹⁹ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.159

jumlahnya tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak masyarakat, artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah upah minimum.²⁰

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran menurut Nanga adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat diakibatkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia, dan tidak memenuhinya kualifikasi tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia.²¹

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana hak atau kebutuhan dasar seseorang seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum terpenuhi. Kemiskinan dapat digunakan sebagai alat ukur keadaan sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu daerah. Dilihat dari segi ekonomi, teridentifikasi beberapa pemicu kemiskinan adalah, kemiskinan diakibatkan karena pola

²⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.184

²¹ Ponirin dan Lukitaningsih, *Sosiologi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal.145

kepemilikan sumberdaya tidak menyeluruh sehingga mengakibatkan distribusi pemasukan tidak menyeluruh.²²

2. Definisi Operasional

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia dapat diukur dengan menggabungkan 4 komponen (usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita) dalam satu indeks.

b. Upah Minimum

Cara mengukur upah minimum adalah dengan menetapkan dan mengawasi besarnya jumlah pembayaran minimum yang harus diberikan kepada pekerja oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu wilayah atau negara.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan membagi jumlah pencari kerja dengan angkatan kerja (jumlah pekerja plus pencari kerja) dan mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan persentase pengangguran.

²² Ali Khomsun, et. all, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal.2

d. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat diukur dengan mempertimbangkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam memberikan gambaran yang jelas, maka dalam penelitian ini telah disusun suatu sistem penulisan. Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 3 bagian meliputi:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri atas beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai cakupan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang akan dikaji,

penelitian terdahulu, konsep kerangka berpikir serta pencantuman hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan tentang mekanisme penelitian yang dilakukan, yang meliputi pendekatan, jenis, populasi sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil yang didapat setelah melakukan penelitian. Dilakukan penyajian data terkait dengan topik dan rumusan pertanyaan yang telah disusun dan hasil dari proses analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V : Pembahasan

Bab ini memaparkan pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian dalam metode penelitian.

Bab VI : Penutup

Bagian ini merupakan bab akhir dalam sebuah penelitian, yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.